



## POTENSI DAN TANTANGAN LOMBOK SEBAGAI PUSAT BUDIDAYA LOBSTER

Eddy Trisno Pongbatto<sup>1\*</sup>, Agussalim Burhanuddin<sup>2</sup>, M. Yusuf. M<sup>3</sup>

<sup>1, 2, 3</sup> Prodi Hubungan Internasional, Fakultas FISIP, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia

\* Penulis Korespondensi. Email: [eddypongbatto@gmail.com](mailto:eddypongbatto@gmail.com)

(Diterima : 06-November -2023; Disetujui: 01-Januari-2024; Online: 28-Februari-2024)



©2022 The Authors. Ini adalah artikel dengan akses terbuka dibawah license CC BY-NC-4.0 (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

### ABSTRACT

*This Lobster is one of the commodities that is in relatively high demand in the Southeast Asia region. In Indonesia itself, there is a region that has the most significant lobster potential, namely Lombok. However, in efforts to make Lombok a center for lobster cultivation, there are several challenges, so these efforts need to be improved. This research will analyze the potential and challenges in the Lombok region to make it a center for lobster cultivation. This research uses a qualitative literature review or literature study approach model where the data used by the author is secondary data. Then, the results of the review of credible journals and news websites are used to answer research problems. This research will discuss the potential and challenges that Lombok has as a center for lobster cultivation.*

**Keywords:** Challenges; Government; Lobster Cultivation; Lombok; Potential

### 1. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki wilayah perairan yang sangat luas bahkan bila di bandingkan dari wilayah daratannya. Hal ini sendiri terlihat dari Indonesia yang menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia serta garis pantainya terpanjang kedua setelah negara Kanada. Berdasarkan ketentuan dari Bab IV UNCLOS 1982 atau dikenal sebagai Konvensi Hukum Laut PBB, wilayah perairan Indonesia memiliki luas sekitar 3,1 juta km<sup>2</sup> ditambah dan bila ditambahkan dengan luas dari zona ekonomi eksklusif (ZEE) yang berkisar 2,7 juta km<sup>2</sup> maka luas seluruh perairan Indonesia adalah sekitar 5,8 juta km<sup>2</sup>. Negara Indonesia juga memiliki panjang garis pantai yang berkisar 81,000 km, serta dianugerahi oleh gugusan pulau yang berjumlah 17. 508 pulau ( Andriani & Arsana dalam Sabir & Mekodompit, 2023).

Dengan luasnya perairan dan banyaknya pulau yang dimiliki oleh Indonesia ini, membuatnya memiliki banyak potensi sumberdaya yang tentunya bisa digunakan untuk kepentingan masyarakat Indonesia itu sendiri. Potensi sumberdaya tersebut seperti sumberdaya hayati, sumberdaya mineral dan energi, transportasi laut dan jasa kelautan, potensi Industri dan juga potensi kultural (Arianto, 2020). Sehingga tentu diperlukan peran pemerintah dalam upaya memaksimalkan besarnya potensi sumberdaya yang dimiliki Indonesia ini termasuk dalam sektor sumberdaya ikan. Wilayah Indonesia yang hampir 75% berupa perairan tentu menjadikan wilayah ini penuh akan sumberdaya ikan yang bukan cuma sebagai makanan untuk masyarakat saja namun bisa menjadi komoditi jual yang berdampak pada kehidupan perekonomian

masyarakat pesisir pantai dan juga bagi perekonomian nasional (Sabir & Mekodompit, 2023).

Menurut Arianto (2020), Indonesia termasuk negara yang kaya akan sumberdaya lautnya dengan tingkat keberagamannya yang tinggi. Perairan Indonesia memiliki sekitar 2000 spesies dari jumlah 7000 spesies ikan yang ada didunia, potensi sumberdaya perikanan sendiri diangka 6,4 juta ton pertahun. Dari jumlah tersebut ada sekitar 80% atau 5,12 juta ton Jumlah tangkapan yang diperbolehkan (JTB) yang mana potensi perikanan ini berada di 9 wilayah pengelolaan perikanan Indonesia (WPPI). Salah satu sumber daya tersebut adalah lobster yang menyumbang sekitar 0,004 juta ton pertahun, dimana potensi tersebut masih bisa meningkat bila upaya budidaya yang terus diupayakan dan ditambah dengan dukungan sarana dan prasarana dari pemerintah Indonesia.

Menurut Rianta Pratiwi (2018). lobster merupakan udang karang yang hidup di kawasan perairan dangkal sekitaran 100-200 meter dibawah permukaan laut yang memiliki suhu berkisar 20-30 Celcius. Lobster sendiri melalui beberapa fase dalam siklus hidupnya, dimulai dengan masa reproduksi/berkembangbiak, setelah itu fase larva filosoma, selanjutnya lobster melalui fase lobster muda (puerulus), dan akhirnya mencapai fase terakhir yaitu lobster dewasa. Dalam masa reproduksi, lobster betina dewasa biasanya menghasilkan sekitar 460.000 benih lobster dengan masa inkubasi 3-4 minggu, dimana saat tumbuh dewasa lobster betina akan memiliki panjang 16 cm sedangkan lobster jantan memiliki 20 cm.

Lobster merupakan hewan laut yang bisa ditemukan hamoir di seluruh perairan Indonesia yang mana lobster-lobster memiliki nilai ekonomi yang tinggi serta tingkat permintaan yang tinggi dari luar negeri sebab memiliki daging yang halus, lezat dan tinggi akan kandungan protein. Oleh karena itu, pemerintah terus mengupayakan agenda dan program untuk terus meningkatkan dan memaksimalkan potensi lobster yang ada di wilayah perairan Indonesia. Ada beberapa wilayah di Indonesia yang menjadi tempat pembudidayaan lobster ini, salah satunya adalah wilayah lombok di Nusa Tenggara barat yang perairannya dikenal subur akan potensi dan ekosistem bibit lobster.

Berdasarkan pemaparan diatas maka tulisan ini akan berfokus membahas mengenai bagaimana potensi dan tantangan yang dimiliki oleh perairan lombok sehingga menjadi sentral dari budidaya lobster?

## 2. METODE

Dalam proses penelitian ini, penulis menggunakan model pendekatan kualitatif *literature review* atau studi literatur yang mana data yang digunakan oleh penulis merupakan data sekunder, kemudian hasil dari telaah terhadap jurnal-jurnal dan website berita kredibel tersebut digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Selanjutnya, fokus dari penelitian ini hanya membahas seputar potensi dan tantangan yang dimiliki lombok sebagai pusat budidaya lobster.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Kondisi Perairan Lombok dan Potensinya

Indonesia termasuk salah satu negara yang diberkahi oleh sumber daya alam yang melimpah mulai dari sumber daya hayati dan bahari. Dengan luasnya wilayah perairan serta dengan banyaknya kepulauan membuat besarnya potensi yang dimiliki oleh negara yang dilewati oleh garis khatulistiwa ini. Beragamnya ikan, terumbu karang, serta pantai yang indah membuat banyak masyarakat Indonesia yang menggantungkan hidupnya terhadap laut Indonesia yang luas. Banyak masyarakat

yang menjadi nelayan, membuat bisnis tambak ikan, serta memanfaatkan keindahan pantai sebagai objek wisata dan masih banyak aktivitas ekonomi lainnya yang terjadi di laut Indonesia, hal ini lah yang menjadi bukti betapa penting dan bermanfaatnya wilayah laut Indonesia yang luas ini.

Lombok yang merupakan salah satu bagian dari Nusa Tenggara Barat menjadi wilayah yang juga memiliki potensi yang besar atas sumber daya lautnya. Berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh *Wildlife Conservation Society (WCS)* pada tahun 2013 lalu terkait ekologi terumbu karang perairan lombok mendapatkan bahwa terumbu karang di perairan lombok terdiri atas 66 genera karang keras yang berasal dari 17 famili karang keras. Selanjutnya mereka juga mendapati biomassa ikan karang di lombok sebesar 541 kg per hektar dimana lokasi tertinggi ada di lombok barat. WCS juga mendapati 578 spesies yang berasal dari 162 genera dan 49 famili ikan karang yang ditemukan selama survei (Wilhardandi, 2014).

Melimpahnya potensi sumber daya laut yang ditemukan di perairan lombok ini tak terlepas dari kondisi lautnya, Menurut Marpaung, dkk (2015) yang meneliti kondisi perairan teluk ekas di lombok timur saat musim peralihan menjelaskan bahwa suhu di perairan tersebut berkisar 28-30 Celcius, hal inilah yang menyebabkan banyaknya ditemukan biota laut seperti bintang laut, rumput laut, karang laut, ikan pelagis kecil. Tingkat keasinan/salinitas di perairan teluk ekas lombok timur sendiri berkisar 34-36 psu yang berdampak pada meningkatnya oksigen terlarut di perairan tersebut yang berkisar 5 mg/l, dimana semakin tinggi nilai oksigen terlarut ini maka kualitas air tersebut juga semakin baik. Disebabkan oleh kondisi inilah banyak masyarakat di pesisir perairan lombok terkhusus di wilayah lombok timur melakukan aktivitas pembudidayaan hewan laut seperti budidaya lobster.

Menurut Thao dalam Junaidi, dkk (2018), dimana stadia lobster berasosiasi dengan kondisi lingkungan dan menunjukkan adaptasi yang nyata, stadia lobster akan mengapung pada permukaan air yang nantinya akan dibawa oleh angin, gelombang, dan arus. Sehingga bisa dikatakan bahwa ketersediaan serta kelimpahan lobster di alam sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dari perairan tersebut.

Menurut hasil penelitian dan pemantauan yang dilakukan oleh Junaidi, dkk (2018), yang melakukan pengukuran kualitas perairan di wilayah lombok khususnya lombok utara mendapati kecerahan di perairan itu berkisar 14,3 m yang mana nilai ini menunjukkan bahwa perairan lombok utara itu sangat mendukung pertumbuhan biota laut termasuk lobster. Sedangkan kondisi pH di wilayah tersebut berada di kisaran pH 8,0-8,2, yang menunjukkan bahwa kondisinya cukup basah sehingga ideal untuk pengembangan budidaya laut berbagai komoditi. Kondisi salinitas sendiri berkisar 29-31 ppt dan oksigen terlarut yang cukup tinggi dengan kisaran 6,8-8,7 mg.l, kondisi tersebut dikategorikan sesuai untuk perkembangan biota laut. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa karakteristik fisika-kimia perairan seperti pH, salinitas, kecerahan, suhu, oksigen terlarut dan kekeruhan telah memenuhi ambang batas baku untuk pembudidayaan biota laut termasuk lobster.

Menurut Apriliani dkk. (2021), yang melakukan penelitian di lombok mengatakan bahwa ada tiga lokasi yang memiliki potensi sebagai penghasil benih lobster di wilayah lombok timur tiga lokasi tersebut adalah Teluk Awang, Teluk Gerupuk, dan Teluk Telong Elong. Hal ini sendiri didasarkan pada kondisi alam di ketiga lokasi tersebut, dimana terdapat garis pantai yang panjang, benih lobster yang tersedia secara alami, dan juga tersedianya makanan lobster yaitu ikan rucah di kawasan tersebut. Ikan rucah sendiri merupakan makanan utama lobster yang mana setelah dipancing, ikan rucah akan dicincang kasar lalu diberikan kepada lobster setiap paginya

### 3.2 Ekspor Benih Lobster

Lobster merupakan salah satu komoditas perikanan Indonesia yang memiliki potensi yang sangat besar dan perlu dikembangkan oleh pemerintah dengan tujuan dipasarkan di dalam negeri dan pasar internasional. Terlebih lagi, permintaan lobster di pasar internasional termasuk sangat tinggi (Apriliani, 2021), sehingga perlu dikelola sebaik mungkin agar meningkatkan jumlah ekspor lobster yang berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat pembudidaya dan juga bagi perekonomian Indonesia.

Awalnya penemuan benih lobster di wilayah lombok ini sendiri terjadi pada awal tahun 2000-an, dimana para pembudidaya hasil laut di lombok menemukan sejumlah bibit *spiny lobster* atau yang lobster berduri yang secara alami menetap di tambak rumput laut dan keramba apung yang awalnya digunakan masyarakat lombok sebagai tempat pembudidayaan ikan kerapu. Kehadiran bibit-bibit lobster ini dilihat oleh para pembudidaya sebagai peluang bisnis mengingat ketika itu harga pasar lobster serta (*demand*) permintaan pasar akan lobster cenderung tinggi. Akhirnya pemerintah pun mengembangkan teknologi serta metode-metode yang dipakai untuk menangkap bibit lobster dalam jumlah besar sehingga dapat diperjualbelikan (Andira et al. 2021).

Pada rentang tahun 2012-2013, permintaan pasar luar Indonesia akan bibit lobster meningkat dari segi kuantitas dan frekuensi sehingga terus menaikkan harga per ekor dari bibit lobster yang ada. Pada tahun 2012, harga bibit lobster yang berukuran 2-3 cm berkisar di harga Rp 2.000 - 2.500,- per ekor. Satu tahun kemudian akibat ekspor bibit lobster yang terus meningkat pada 2013 harga bibit lobster per ekor meningkat berkali-kali lipat, yaitu seharga Rp 13.000,- per ekor, dan mencapai harga tertingginya yaitu Rp 14.000 - 20.000, per ekor di akhir tahun 2014. Pada periode ini volume penangkapan bibit yang dilakukan meningkat sebanyak 3 juta ekor bibit per tahun (Erlania et al. 2015).

Vietnam sendiri merupakan salah satu negara yang menjadi pengeksport tertinggi benih lobster dari Indonesia. Negara yang dikenal dengan teknologi budidaya lobster modern ini melakukan kerjasama bilateral dengan Indonesia dalam hal ekspor-impor benih lobster, dimana Indonesia berperan dalam mengumpulkan benih lobster dalam jumlah besar lalu di ekspor ke Vietnam. Dengan teknologi modern yang dimilikinya, Vietnam kemudian membesarkan bibit-bibit ini hingga dewasa lalu menjualnya dengan harga yang jauh lebih mahal. Indonesia sendiri pada tahun 2013 mendapatkan Rp 17,4 miliar dari hasil eksportnya ke Vietnam.

Pada tahun 2014 sendiri, Vietnam menjadi negara pengeksport benih lobster tertinggi Indonesia dengan persentase 89,59 %. Hal ini tak terlepas dari daya beli Vietnam yang 2 kali lipat lebih tinggi dari negara-negara lain sehingga membuat Indonesia melirik Vietnam sebagai tujuan utama ekspor benih lobsternya.

Berbeda dengan Indonesia, negara Vietnam telah melakukan kegiatan budidaya lobster sejak tahun 1992 yang dimulai di kota Nha Trang Provinsi Khanh Hoa yang kemudian menyebar ke provinsi-provinsi lainnya dan berkembang hingga sekarang. Tingginya permintaan lobster mutiara pada tahun 1980-an, menyebabkan meningkatnya penangkapan lobster di awal tahun 90-an, sebagai akibatnya jumlah lobster yang ditangkap berkurang serta ukuran lobster hasil tangkapan yang menjadi lebih kecil. Hal inilah yang membuat para nelayan di Vietnam berinisiatif untuk memelihara lobster hasil tangkapan yang berukuran kecil hingga mencapai besar yang sesuai dengan ukuran pasar meskipun hanya bermodalkan metode-metode dan peralatan yang sifatnya sementara.

Indonesia pada saat itu belum memiliki teknologi memadai yang bisa membantu dan menjamin kelancaran nelayan dalam usaha membudidayakan lobster hingga dewasa, hal inilah yang menyebabkan banyak nelayan memilih untuk menjual benih



lobster yang mereka dapatkan. Selain masalah teknologi yang masih tradisional, upaya budidaya pembesaran lobster yang dilakukan oleh masyarakat di Indonesia termasuk di lombok masih menghadapi banyak kendala, seperti pakan, penyakit, serta waktu pemeliharaan lobster menjadi dewasa yang relatif lama.

Setelah menggunakan teknologi yang lebih modern, produksi lobster yang dihasilkan oleh Vietnam meningkat pesat sejak 1992 dan puncaknya terjadi di 2006. Namun produksi lobster vietnam ini mengalami penurunan di tahun 2007 hingga tahun-tahun berikutnya akibat benih lobster mereka terserang penyakit insang hitam (*black gill disease*), penyakit badan merah (*red body disease*), dan penyakit susu (*milk disease*). Akibat dari serangan penyakit ini, kualitas dari benih lobster di Vietnam mengalami penurunan yang memaksanya harus melakukan impor benih lobster dari negara lain termasuk negara Indonesia yang menjadi pengeksport terbesar benih lobster ke Vietnam, dan akhirnya mengakibatkan ketergantungan atas benih lobster dari Indonesia (Hilal, 2016).

Ketergantungan benih lobster dari Indonesia pada akhirnya menjadi batu sandungan bagi Vietnam pada saat Indonesia memberlakukan larangan untuk ekspor ke Luar negeri menyebabkan penurunan pendapatan ekspor lobster dewasa secara drastis di negara Vietnam. Tahun 2016 Vietnam hanya mendapatkan keuntungan sebanyak \$6,77 juta, dan menurun di tahun berikutnya dengan pendapatan sebesar \$6,12 juta, serta menurun drastis di tahun 2018 dengan pendapatan hanya sebesar \$4,24 juta.

### 3.3 Pelarangan Ekspor Benih Lobster

Dengan tingginya permintaan Vietnam untuk ekspor benih lobster ini, mengakibatkan banyak pembudidaya yang melakukan penangkapan benih lobster secara besar-besaran (Dina & Hasanah, 2020), yang berujung pada tindakan eksploitasi yang nantinya akan merusak ekosistem dari lobster itu sendiri. Penangkapan dari bibit lobster sendiri membawa dampak yang sangat baik secara sosial dan ekonomi bagi para masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dalam aktivitas penangkapan bibit lobster, namun akibat tiadanya aturan yang pasti dalam penangkapan bibit lobster mengakibatkan over-eksploitasi yang mengancam kepunahan dari lobster itu sendiri. Banyak yang memperkirakan dampak dari penangkapan besar-besaran lobster ini terhadap ekologi yaitu akan menurunkan stok bibit lobster yang ada di alam. Hal ini tentu akan sangat merugikan di kemudian hari, dimana seperti yang diketahui bahwa ketersediaan sumberdaya lobster dan bibit lobster di alam merupakan kunci keberlanjutan ekonomi lobster di masa depan. Berkurangnya stok lobster di alam mengakibatkan nilai ekspor lobster dewasa menurun. Menurut data dari kementerian kelautan dan perikanan, nilai ekspor lobster dari rentan waktu 2013-2014 mengalami penurunan secara konstan. Berbeda dengan ekspor benih lobsternya yang mengalami peningkatan berkali-kali lipat dalam periode tahun tersebut.

Meningkatnya nilai ekspor tentu meningkatkan devisa suatu negara dan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Namun disisi lain mengakibatkan fenomena *overfishing* terhadap komoditi benih lobster, dimana lobster sendiri mengalami dua jenis *overfishing*. Yang pertama yaitu *growth overfishing*, dimana banyak lobster-lobster kecil yang tertangkap sehingga tidak cukup waktu untuk bertumbuh menjadi ukuran yang layak jual. Yang kedua yaitu *recruitment overfishing*, yaitu dimana banyak lobster yang sedang dalam keadaan matang gonad tertangkap sehingga jumlah induk yang melakukan pemijahan berkurang, hal inilah yang berdampak pada jumlah anakan baru menipis (Hilal, 2016).

Untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, dimasa pemerintahan Jokowi, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengeluarkan Peraturan Kementerian Kelautan

dan Perikanan (PERMEN KP) Nomor 1 tahun 2015 mengenai pelarangan penangkapan lobster yang sedang dalam kondisi bertelur, Peraturan ini pun diperbaharui melalui PERMEN KP nomor 56 tahun 2016 yang melarang perdagangan/penangkapan lobster yang sedang bertelur dan yang berat per-ekornya dibawah 200 gram serta pelarangan penjualan benih lobster untuk budidaya.

Mantan menteri KKP Susi Pudjiastuti yang mengeluarkan aturan ini pada tahun 2016, menurutnya ekspor benih lobster yang dilakukan oleh Indonesia hanyalah keuntungan yang bersifat sementara yang berdampak lebih parah terhadap stabilitas habitat dan keberlangsungan ekosistem laut termasuk lobster sehingga kegiatan penjualan dan ekspor benih lobster ke luar negeri harus dilarang. Hal inilah yang kemudian merubah tindakan Indonesia yang awalnya hanya menangkap bibit tersebut untuk dijual, namun setelah PERMEN KP tersebut keluar bibit-bibit tersebut harus di budidaya menjadi lobster dewasa sehingga bisa dijual di pasar domestik dan diekspor ke luar Indonesia (Andira *et al*, 2021). Selain itu, harga dari lobster dewasa lebih mahal daripada bibit lobster, ini merupakan salah satu pertimbangan pemerintah melarang ekspor bibit lobster

### 3.4 Implikasi Pelarangan Benih Lobster

Tak membutuhkan waktu lama Setelah PERMEN KP nomor 56 tahun 2016 diberlakukan, peraturan tersebut langsung menuai pro-kontra di antara masyarakat terutama dari nelayan yang mengandalkan penangkapan benih lobster ini untuk kebutuhan hidup sehari-hari(Hilal, 2016). Sebagian besar nelayan yang ada di Lombok menolak PERMEN KP ini, karena dengan adanya peraturan ini mereka kehilangan penghasilan dan akhirnya mengalami kesusahan dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Meskipun masih bisa melakukan penangkapan terhadap komoditi selain lobster namun penghasilan yang mereka dapat tidak sebanyak ketika peraturan ini belum berlaku. Pemberian kompensasi juga tak sesuai harapan para nelayan, dimana mereka hanya diberikan Keranjang Jaring Apung sebagai bantuan dari pemerintah, sedangkan untuk pakan serta bibit lobster harus disediakan sendiri oleh para nelayan. Hal ini berdampak langsung terhadap tidak optimalnya pemanfaatan bantuan dari pemerintah untuk para nelayan ini sehingga banyak yang terbengkalai bahkan ditinggalkan (Husni dkk. 2021).

Menurut Erlina dkk. (2016), yang meneliti tentang dampak setelah terbitnya PERMEN KP tersebut terhadap kehidupan masyarakat di lombok timur dan lombok tengah yaitu sebagai berikut :

- 1) Menurunnya aktivitas penangkapan lobster, setelah peraturan KP diterbitkan tingkat penangkapan benih lobster oleh nelayan menurun hampir 100%. Masyarakat menjadi takut untuk melakukan aktivitas penangkapan benih lobster. Namun hal ini juga menimbulkan masalah baru dimana banyak nelayan secara sembunyi-sembunyi menangkap benih lobster untuk dijual ke pengepul yang masih ingin melakukan ekspor benih secara ilegal.
- 2) Pendapatan nelayan yang menurun secara drastis, tingginya permintaan ekspor dari luar negeri membuat banyak nelayan di lombok yang awalnya hanya sebagai pembudidaya ikan biasa merubah profesi mereka sebagai pembudidaya lobster. Setelah Peraturan menteri KP terbit, pendapatan masyarakat langsung menurun secara drastis. Tercatat ada sebanyak 5.632 total nelayan pembudidaya seluruh NTB yang mengalami penurunan pendapatan yang diprediksi mereka kehilangan sebesar 35,14 - 54,07 miliar rupiah perbulan. Bila dihitung dengan waktu penangkapan lobster yang berkisar selama 8 bulan, maka para nelayan tersebut kehilangan pendapatan total 281 - 433 miliar.

- 3) Meningkatnya jumlah pengangguran, banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan setelah diterbitkannya peraturan ini. Hal ini sendiri disebabkan oleh banyak masyarakat yang menggantungkan hidup mereka terhadap aktivitas penangkapan benih lobster ini, sehingga saat aturan ini mulai berlaku maka para masyarakat tersebut tidak memiliki pekerjaan lain. Tingkat kriminalitas di wilayah lombok juga meningkat secara drastis yang dikaitkan dengan banyaknya pengangguran.

Terganggunya aktivitas pembesaran lobster, harga benih lobster menjadi sangat mahal akibat pelarangan kepada nelayan untuk penangkapan benih lobster sehingga memaksa masyarakat pembudidaya untuk membeli benih lobster yang sangat mahal. Hal ini lah berdampak pada kegiatan pembesaran lobster menjadi terhenti.

### 3.5 Ekspor benih lobster di zaman Menteri Edhy Prabowo

Ekspor benih lobster yang sempat dilarang pada tahun 2016 melalui PERMEN nomor 56 tahun 2016 yang didasarkan pada upaya menjaga keseimbangan ekosistem lobster yang ada di alam akibat dari eksploitasi berlebihan dalam penangkapan benih lobster oleh masyarakat. Penangkapan benih lobster secara besar-besaran oleh masyarakat nelayan pada saat itu menyebabkan terancamnya habitat lobster yang bisa berdampak pada kepunahan dan kerusakan pada terumbu karang.

Namun di tahun 2020 melalui Menteri Kelautan yang baru yaitu Edhy Prabowo melakukan revisi atas aturan ini dengan menerapkan PERMEN KP nomor 12 tahun 2020. Inti dari peraturan ini sendiri ialah agar penangkapan lobster oleh masyarakat tidak dilarang lagi. Menteri KP periode 2019-2020 Edhy prabowo menuturkan bahwa mata pencaharian masyarakat nelayan menghilang setelah adanya larangan untuk tidak menangkap benih lobster. Ia juga beralasan bahwa kebijakan ini dapat membantu mensejahterakan nelayan melalui perizinan yang mudah dalam menangkap benih lobster (Rossa dkk, 2021).

Meskipun kebijakan pembukaan ekspor benih lobster ini banyak menerima pro-kontra di masyarakat karena ditakutkan dapat mengganggu ekosistem alam, namun Menteri asal sumatera selatan itu menampik dengan mengatakan bahwa banyak lobster di alam yang mati secara alami sehingga perlu adanya ekspor agar para lobster tersebut bernilai ekonomi bagi negara. Edhy juga menuturkan bahwa lobster di alam Indonesia itu jauh dari kata punah sehingga tak akan menjadi masalah bila dilakukan ekspor benih lobster. Dalam mengatasi masalah penyelundupan benih lobster yang sering terjadi setelah PERMEN KP 2016, Edhy mengungkapkan bahwa itu bisa diatasi dengan melakukan ekspor (Pranata, 2021).

Namun banyak masalah dan kejanggalan sejak PERMEN KP nomor 12 tahun 2020 ini terbit, mulai dari banyaknya pengusaha yang langsung melakukan ekspor benih tanpa harus melakukan budidaya terlebih dahulu. Padahal dalam PERMEN KP ini diwajibkan untuk pengusaha melakukan kegiatan budidaya sebelum melakukan ekspor benih lobster (Rossa dkk, 2021). Kesenjangan harga jual ekspor juga terjadi antara nelayan dan pihak eksportir, perbedaan harga jual juga terjadi di wilayah yang sama-sama penghasil benih lobster. Hal ini tentu saja menjadi kerugian tersendiri bagi nelayan, harga jual benih lobster sendiri pada saat itu berkisar di Rp3.000 sampai Rp5.000 sedangkan harga jual lobster di Vietnam setelah di budidaya jadi dewasa sekitar Rp139.000. (Hidayatullah dalam Rossa dkk, 2021). Ketimpangan harga yang terjadi tersebut tentu dapat memberikan dampak buruk terutama dalam meningkatnya ekspor benih ilegal.

Puncaknya ketika Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersandung dalam kasus korupsi yaitu dugaan suap ekspor benih lobster. KPK sendiri berhasil

melakukan operasi tangkap tangan terhadap Edhy dan para jajarannya pada hari rabu tanggal 25 November 2020. Dalam kasus ini Edhy beserta bawahannya terbukti telah menerima suap sebesar US\$ 77 ribu dan Rp 24,6 miliar untuk mempermudah pengajuan ekspor benih lobster (Bintang, 2023). Hal ini tentu sangat mengejutkan khalayak umum. Dimana Edhy sendiri dikenal sebagai seorang populis yang selalu membawa kepentingan masyarakat dalam setiap wawancaranya ketika berbicara mengenai pembukaan kembali keran ekspor. Dengan adanya kasus ini tentunya masyarakat mempertanyakan apakah sebenarnya rencana Edhy prabowo dalam membuka kembali keran ekspor ini bertujuan untuk kepentingan masyarakat atau hanya upaya untuk memperkaya dirinya dan sebagian pihak saja.

Susi Pudjiastuti sebagai menteri yang menerbitkan PERMEN KP nomor 56 tahun 2016 menuturkan bahwa kebijakannya dalam melarang ekspor benih lobster saat itu bukan hanya sebagai cara melestarikan stok lobster di alam tetapi juga untuk menghentikan kerugian yang diakibatkan oleh ekspor benih lobster ini. Vietnam yang diketahui sebagai pengeksport terbesar benih lobster dari Indonesia mendapatkan keuntungan sebanyak 1.000 ton per tahun sedangkan Indonesia hanya mampu mendapat keuntungan sekitar 300 ton per tahunnya. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan Susi dalam membuat kebijakan pelarangan ekspor benih lobster dan lebih mendorong para nelayan untuk melakukan budidaya lobster hingga dewasa agar memberikan keuntungan yang lebih besar, serta terus menjaga populasi lobster yang ada di Indonesia terkhusus di wilayah lombok.

Setelah kasus korupsi yang melibatkan Menteri KP Edhy Prabowo, pemerintah langsung mengeluarkan aturan yang menghentikan sementara ekspor benih lobster. KKP yang saat itu dipimpin oleh menteri interim Luhut Binsar Pandjaitan yang ditunjuk oleh Presiden untuk menggantikan menteri sebelumnya yang terjerat kasus suap ekspor benih lobster yaitu Edhy Prabowo. Sehari setelah ditunjuk sebagai menteri interim, Luhut langsung mengeluarkan kebijakan untuk kembali melarang ekspor benih lobster.

### **3.6 Tantangan dan upaya pemerintah dalam menjadikan lombok sebagai pusat budidaya lobster**

Sejak pertama lobster ditemukan di perairan lombok, usaha budidaya lobster telah lama diusahakan oleh pemerintah dan masyarakat nelayan. Namun banyak tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam usaha membudidayakan lobster ini hingga dewasa, mulai dari minimnya teknologi yang dimiliki masyarakat nelayan, masalah pakan, dan kualitas bibit lobster yang ingin dibudidayakan juga kadang tidak sebaik yang diharapkan. Dalam masalah pakan sendiri, banyak nelayan yang masih mengandalkan ikan rucah sebagai makanan untuk diberikan kepada lobster budidaya ini.

Ikan rucah sendiri dikenal sebagai pakan yang mempunyai protein tinggi dan harga yang relatif murah. Namun sebagai pakan, ikan rucah memiliki tingkat rasio konversi pakan yang tinggi, sehingga diperlukan ikan rucah dalam jumlah yang banyak dalam mendukung pertumbuhan lobster budidaya ini, belum lagi masalah limbah yang ditimbulkan oleh ikan rucah ini, dan ketersediaan ikan rucah ini hanya melimpah pada musim barat saja, saat musim timur tiba ketersediaan ikan rucah di alam menjadi menipis dan akhirnya meningkatkan harga dari pekan ini (Junaidi dkk, 2023). Kendala-kendala tersebutlah yang dijadikan alasan bagi para masyarakat nelayan untuk langsung menjual benih lobster hasil tangkapan mereka kepada pengeksport, daripada harus membudidayakan lobster tersebut hingga dewasa dengan resiko kegagalan yang tinggi dan waktu menunggu pertumbuhan lobster hingga dewasa yang cukup lama.

Dalam mengatasi tantangan yang dihadapi oleh para masyarakat nelayan, tentu



diperlukan peran aktif pemerintah dalam membantu dan memfasilitasi usaha masyarakat dalam membudidayakan lobster ini. Pelarangan ekspor yang diberlakukan juga berdampak langsung bagi kondisi sosial dan ekonomi masyarakat nelayan yang awalnya bekerja sebagai penangkap benih lobster. Banyak yang kehilangan penghasilan setelah keluarnya aturan pelarangan lobster, dan memaksa masyarakat nelayan terutama di Lombok untuk melakukan usaha budidaya lobster yang mempunyai rasio waktu lebih lama dan resiko kegagalan yang tinggi. Sebagai bentuk tanggung jawab dan bentuk dukungan nyata pemerintah bagi masyarakat nelayan di wilayah Lombok dalam memaksimalkan potensi sumberdaya lobster yang tinggi, pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan meresmikan Lombok timur sebagai kampung budidaya lobster.

Peresmian tersebut sendiri menurut Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu sebagai upaya dalam mewujudkan kampung budidaya lobster yang terkoneksi sarana budidaya serta sarana yang dapat mendukung lainnya. Haeru sendiri mengharapkan bahwa peresmian tersebut dapat menjaga hubungan pelaku pasar dengan para pembudidaya yang nantinya juga dapat meningkatkan hasil produksi dan berimplikasi pada kesejahteraan dari para pembudidaya itu sendiri. Pemerintah Lombok Timur sendiri merespon langkah yang dilakukan oleh KKP tersebut dengan memperbaiki beberapa sarana menuju ke tempat budidaya lobster seperti membangun jembatan, memperbaiki dermaga, dan penataan kawasan teluk ekas (Rahman, 2022).

#### **4. SIMPULAN**

Lombok termasuk sebagai wilayah di Indonesia yang memiliki potensi sumber daya yang sangat besar. Kondisi lautnya yang sangat subur dengan suhu, tingkat keasinan, dan tingkat oksigen terlarut yang tergolong baik yang membuat wilayah ini cocok menjadi tempat budidaya perikanan seperti lobster yang menjanjikan bagi masyarakat nelayan.

Sejak ditemukannya benih lobster di perairan Lombok pada awal tahun 2000, tidak sedikit masyarakat yang awalnya adalah pembudidaya ikan kerapu mengubah profesi mereka sebagai penangkap benih lobster yang memiliki permintaan yang sangat tinggi dari luar negeri dan bernilai ekonomis besar bagi masyarakat nelayan dengan Vietnam sebagai pengeksport benih lobster tertinggi dari Indonesia.

Hal ini mengakibatkan semakin banyaknya benih lobster yang ditangkap yang berujung pada over eksploitasi yang mengancam ekosistem dari lobster itu sendiri. Khawatir tentang ancaman kepunahan dari lobster melahirkan Permen KP no 56 tahun 2016 yang melarang penangkapan benih lobster dan ekspor benih lobster ke luar negeri. Hal ini pun menuai pro-kontra di masyarakat nelayan, banyak masyarakat yang mengeluh kehilangan pekerjaan dan menurunnya pendapatan.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan dukungan terhadap masyarakat nelayan Lombok, pemerintah meresmikan Lombok timur sebagai kampung lobster yang mana peresmian ini sebagai upaya pemerintah dalam memberikan sarana dan prasarana untuk membantu masyarakat nelayan yang menghadapi banyak tantangan dalam usaha membudidayakan lobster ini demi kepentingan ekonomi negara dan kesejahteraan masyarakat nelayan itu sendiri.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Andira, A. S., et al. (2021). Diplomasi Ekonomi Indonesia terhadap Vietnam melalui Kerjasama Ekspor Benih Lobster pada tahun 2020-2021. *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi*, 122-140.

- Apriliyani, T., et al. (2021). Lobster aquaculture business in East Lombok Regency: challenges and prospects. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 674(012052), 1-6.
- Dina, K. B., & Hasanah, H. (2020). Analisis PermenKP No. 12/2020 Terkait Kebijakan Ekspor Benih Lobster berdasarkan Prinsip Pembangunan Berkelanjutan pada New Normal. *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia*, 7(1), 48-70.
- Erlina, et al. (2016). Status Pengelolaan Sumberdaya Benih Lobster Untuk Mendukung Perikanan Budidaya: Studi Kasus Perairan Pulau Lombok. *Jurnal Kebijakan Perikanan Indonesia*, 8(2), 85-96.
- Hilal, K. (2016). Kepentingan Indonesia Melarang Ekspor Benih Lobster Ke Vietnam Tahun 2015. *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau*, 3(2), 1-15.
- Husni, S., et al. (2021). KERUGIAN SOSIAL EKONOMI NELAYAN KECIL PASCA KEBIJAKAN LARANGAN PENANGKAPAN BIBIT LOBSTER (Studi Kasus di Desa Batu Nampar Selatan Kabupaten Lombok Timur). *Prosiding SAINTEK*, 3(2021), 59-66.
- Junaidi, M., et al. (2023). Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengembangan Budidaya Lobster Berbasis Ekonomi Biru di Desa Ekas Buana, Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 6(3), 727-734.
- Marpaung, F. F., et al. (2015). Kondisi Perairan Teluk Ekas Lombok Timur Pada Musim Perairan. *Jurnal Akuatika*, 6(2), 198-205.
- Pranata, W. R. (2021). Oprasi Tangkap Tangan KPK Terhadap Kementerian Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo Terkait Kasus Korupsi Ekspor Benih Lobster. *JURNAL MEDIA KOMUNIKASI PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN*, 3(1), 37-48.
- Pratiwi, R. (2018). Keanekaragaman dan Potensi Lobster (Malacostraca: Palinuridae) di Pantai Pameungpeuk, Garut Selatan, Jawa Barat. *Majalah Ilmiah Biologi BIOSFERA: A Scientific Journal*, 35(1), 10-22.
- Rossa, S., et al. (2021). Kegagalan Pasar di Balik Ekspor Benih Lobster di Indonesia. *Journal of Politics and Government*, 3(1), 1-40.
- Sabir, M. R. P., & Mokodompit, E. A. (2023). Analisis Potensi Maritim Indonesia. <https://doi.org/10.31219/osf.io/dnrt3>.
- Bintang A. (2023, Agustus). Remisi Napi Korupsi Eks Menteri KKP Edhy Prabowo, Terbukti Terima Suap Rp 24,6 Miliar. *Nasional Tempo*, Diakses pada 29 Oktober 2023, dari <https://nasional.tempo.co/read/1762188/remisi-napi-korupsi-eks-menteri-kkp-edhy-prabowo-terbukti-terima-suap-rp-246-miliar>.
- Rahman MR. (2022, Maret). KKP resmikan Kampung Lobster di Lombok Timur NTB. *AntaraNews.com*, Diakses pada 2 Oktober 2023, dari <https://www.antaraneews.com/berita/2785629/kkp-resmikan-kampung-lobster-di-lombok-timur-ntb>.
- Wihardandi A. (2014, Januari). Ekosistem Terumbu Karang Pulau Lombok, Menanti Status Legalitas Kawasan. *Mongabay.co.id*, Diakses pada 29 Oktober 2023, dari <https://www.mongabay.co.id/2014/01/27/ekosistem-terumbu-karang-pulau-lombok-menanti-status-legalitas-kawasan/>.